



PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG(PUPR) DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Anies Handayani¹, Istiqamah Bungana²

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : anieshandayani2101@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Penyediaan air bersih merupakan program prioritas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program penyediaan air bersih merupakan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang(PUPR) untuk menyediakan sarana dan prasarana air bersih Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penenlitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang, terdiri atas 1 orang Kepala Bidang Cipta Karya, 1 orang Kepala desa, 1 Masyarakat dikecamatan Bulagi Selatan dan 1 orang masyarakat di kecamatan Bulagi dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui melalui empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pekejaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Program (PUPR) Dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus Kecamatan Bulagi Selatan Dan Bulagi) belum terlaksna keseluruhan . Hal tersebut di dukung fakta dilapangan yang dimana program ini belum terealisasikan kepada masyarakat. Program ini baru sampai pada tahap perencanaan dan belum sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini karena masih memerlukan dukungan anggaran (APBN) yang memadai serta penyelesaian permasalahan lahan.

Kata kunci: Peran; Dinas PUPR; Program; Penyediaan Air Bersih

Abstract

The provision of clean water is a priority program of the local government in order to improve the quality of life of the community. The clean water provision program is an effort of the local government through the Department of Public Works and Spatial Planning (PUPR) to provide clean water facilities and infrastructure. The type of research in this study is a qualitative research type with a total of 4 informants, consisting of 1 Head of the Cipta Karya Division, 1 Village Head, 1 Community in South Bulagi District and 1 community in Bulagi District using the Snowball Sampling technique. Data collection was carried out through observation and interviews. Data analysis used in this study is data analysis using the Miles and Huberman model, which is then analyzed through four activity flows, namely data collection, data reduction,

data presentation, and conclusion drawing/verification. The results of the study indicate that the Role of the Department of Public Works and Spatial Planning in the Program (PUPR) in the Provision of Clean Water in Banggai Kepulauan Regency (Case Study of South Bulagi and Bulagi Districts) has not been fully implemented. This is supported by the fact that this program has not yet been implemented in the community. The program is only in the planning stage and has not yet reached the implementation stage. This is because it still requires adequate budget support (from the state budget) and the resolution of land issues.

Keywords: *Role; Public Works and Housing Agency; Program; Clean Water Provision*

Pendahuluan

Secara etimologi peran berarti seorang yang melakukan tindakan yang dimana tindakan tersebut diharapkan oleh masyarakat lain. Artinya setiap tindakan yang dimiliki setiap individu memiliki arti penting untuk sebagian orang. Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan. Peran adalah serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosial yang di berikan baik secara formal maupun secara informal. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Proses dinamis kedudukan atau status (Soekanto 2009:212).

Peran merujuk pada fungsi atau tanggung jawab yang dijalankan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks sosial, organisasi atau situasi tertentu. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan posisi seseorang dalam interaksi sosial. Peran juga dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. George Herbert Mead berpendapat peran merupakan bagian proses dari interaksi sosial, dimana individu memahami harapan orang lain terhadap dirinya (Praventy, 2022).

Peran juga dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku seseorang yang diharapkan dapat membuat suatu perubahan serta harapan yang mengarah pada kemajuan, meskipun selamanya tidak sesuai dengan yang diharapkan seseorang sebagai seorang pemimpin. Dalam (Modika Yosua Ba 2022). Peran merupakan suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Peranan didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu (Raho 2007:67).

Air adalah kebutuhan dasar bagi seluruh makhluk hidup termasuk manusia, karena manusia tidak bisa hidup tanpa air. Air bersih merupakan salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan biasa di gunakan dan di manfaatkan oleh manusia untuk dikonsumsi sehari- hari. Setiap manusia memiliki hak mendapatkan akses air bersih dalam rangka pemenuhan kebutuhan serta untuk meningkatkan kesehatan lingkungan. Air yang kualitasnya buruk akan mengakibatkan kondisi lingkungan hidup

menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia serta kehidupan makhluk hidup lainnya (Dewi, 2021).

Air adalah kebutuhan pokok yang keberadaannya telah diatur dalam konstitusi negara Indonesia pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yaitu Bumi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” merupakan suatu pembuktian hukum atas hak dasar setiap Warga Negara Indonesia untuk memanfaatkan kekayaan negara untuk kesejahteraan hidupnya. Segala kekayaan yang dimiliki Negara termasuk kekayaan sumber daya air wajib dan mutlak dikelola Negara dan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa perkecualian. Akan tetapi, jutaan warga di berbagai daerah di Tanah Air masih kesulitan mengakses air bersih karena keterbatasan infrastruktur yang ada. akibatnya, kebutuhan akan air menjadi sesuatu yang harus dibayar mahal, dengan kemampuan ekonomi masyarakat kecil yang rendah. akses air bersih merupakan hal yang luar biasa berharga, mengingat kehidupan masyarakat yang lekat dengan sumber air sungai yang keruh dan bercampur limbah. Sebagian besar masyarakat masih terbiasa dengan pola hidup yang jauh dari kata sehat. Sampai saat ini, banyak masyarakat, terutama masyarakat pedesaan, pinggiran perkotaan, pinggiran sungai dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan dan terpencil yang kekurangan akses air bersih menggunakan air kotor untuk kebutuhan sehari-hari. Penyediaan air bersih menjadi perhatian besar bagi pemerintah untuk daerah. Air bersih merupakan kebutuhan utama yang tidak bisa ditawar (Shara, 2021).

Prasarana air bersih merupakan salah satu hal yang penting untuk dikaji mengingat air merupakan kebutuhan pokok yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat dan juga berpengaruh besar pada kelancaran aktivitas masyarakat tersebut. Terpenuhinya kebutuhan akan air bersih merupakan kunci utama bagi perkembangan suatu kegiatan dan menjadi elemen penting bagi keberlanjutan suatu produktivitas perekonomian. Sebenarnya proporsi air yang dikonsumsi untuk rumah tangga dan kegiatan perkotaan sangat kecil bila dibanding dengan ketersediaan air secara keseluruhan, namun bila dikaitkan dengan air yang harus berkualitas dan tersedia secara kontinu menyebabkan pelayanan air bersih bagi penduduk dan kebutuhan perkotaan seringkali merupakan masalah. Pengelolaan Sistem Penyediaan air bersih dilaksanakan apabila prasarana dan sarana yang telah terbangun siap untuk dioperasikan dengan membentuk organisasi penyelenggara Sistem Penyediaan air bersih.(Siregar, 2022).

Penyediaan air bersih merupakan suatu kebutuhan dasar manusia yang esensial untuk kehidupan dan harus terpenuhi atau tercukupi. Penyediaan air bersih yang tidak optimal dapat mempengaruhi derajat kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Penyediaan air bersih sangat terkait dengan kondisi lingkungan alam di suatu wilayah. Akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan menjadi hak fundamental bagi setiap individu, dan merupakan salah satu indikator utama pencapaian pembangunan manusia. Air bersih dibutuhkan masyarakat untuk berbagai keperluan seperti untuk air minum, memasak, mencuci, mandi, menyiram tanaman dan mencuci kendaraan dengan jumlah yang 2 sangat berbeda sesuai dengan tingkat kehidupan sosial, ekonomi dan

kebiasaan hidup masyarakat. Keterbatasan dalam penyediaan prasarana air bersih yang memadai dapat mempengaruhi kehidupan manusia, produktifitas ekonomi dan kualitas kehidupan kota secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, undang-undang ini mengatur mengenai pengelolaan sumber daya air, termasuk penyediaan air bersih. Undang-undang ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah dalam mengatur dan mengelola sumber daya air, termasuk dalam hal penyediaan air bersih. Persyaratan teknis penyediaan air bersih yang baik apabila memenuhi tiga syarat yaitu ketersediaan air dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kualitas air yang memenuhi standar (dalam hal ini Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MENKES/PER/1990 tentang Pedoman Kualitas Air), serta kontinuitas dalam arti air selalu tersedia ketika diperlukan.

Air bersih yang sehat dan berkualitas sangat dibutuhkan oleh masyarakat, karena dengan air bersih yang sehat dan berkualitas serta mengalir akan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Penyediaan suatu wilayah di hadapkan pada kondisi permasalahan yang kompleks secara kuantitas maupun kualitas. Permasalahan air bersih ini di tandai dengan kelangkaan air bersih pada beberapa wilayah. Masyarakat mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas. Salah satunya dikarenakan faktor lokasi penduduk yang jauh dari sumber air sehingga untuk mendapatkan air bersih itu sendiri, masyarakat membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Masyarakat juga 3 menggunakan sumber air tanah dalam(sumur) dan air hujan. Tetapi permasalahan timbul ketika terjadi musim kemarau, dimana sumber air yang berasal dari air tanah dalam (sumur) dan air hujan tersebut mengalami penurunan dan kehilangan debit air sama sekali. Masyarakat berkeinginan untuk mendapatkan air bersih yang sehat dan berkualitas serta kontinu mengalir. Sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat serta meningkatkan akses masyarakat terhadap air bersih maka di berlakukan program penyediaan air bersih.

Program penyediaan air bersih adalah upaya yang dirancang untuk memberikan akses yang memadai dan aman terhadap air bersih. Air bersih dalam Program ini sangat penting untuk kesehatan dan kesejahteraan sehingga program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif suatu jenis penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan fenomena atau kejadian yang di teliti secara mendalam. Peneliti memilih lokasi penelitian di Dinas PUPR Kabupaten Banggai Kepulauan. Informan adalah narasumber yang merujuk pada seseorang yang paham terkait dengan objek penelitian serta mampu memberikan penjabaran tentang topik penelitian yang diangkat (Toding, 2022). Jumlah informan adalah 4 orang. Pengumpulan data di lakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Peran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang(pupr) dalam program penyediaan air bersih di kabupaten banggai kepulauan

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran. Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang diperankan atau dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau status sosial dalam organisasi. Dalam (Praventy, 2022). Dalam Program penyediaan Berdasarkan buku saku petunjuk konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Direktoral Jendral Cipta Karya , Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman, Tahapan penyediaan air bersih yang layak konsumsi dalam sistem penyediaan air minum (SPAM) terdiri dari: persiapan pengumpulan data sekunder , pengumpulan data primer, perencanaan teknis perencanaan teknis air baku ,perencanaan teknis unit transmisi air baku, perencanaaan unit produksi, perencanaan teknis unit distribusi dan perencanaan teknis unit pelayanan.

1. Persiapan

a. Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memastikan bahwa program yang di rancang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Maka berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam tahap persiapan, Dinas PUPR melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dengan turun langsung mempertimbangkan kondisi riil yang terjadi di kecamatan bulagi selatan dan bulagi. Dari hasil analisis, di temukan bahwa ketersediaan pasokan air bersih masih sangat terbatas dan masyarakat masih bergantung pada air hujan dan air sumur. Dan pada saat musim kemarau masyarakat kesulitan air bersih sehingga pemerintah memberikan bantuan air tapi itu pun terbatas sehingga ada sebagian masyarakat membeli air untuk memenuhi kebutuhan sehari- hari dan sampai saat ini masyarakat setempat masih bergantung pada air hujan dan air sumur yang secara kualitas kedua sumber air tersebut belum memenuhi standar kesehatan sehingga dapat menimbulkan masalah kesehatan. Temuan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan.

2. Pengumpulan data sekunder

Pengumpulan data sekunder adalah mengumpulkan data penduduk, kepadatan penduduk dan kondisi eksisting sistem air minum.

Maka berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengumpulan data sekunder seperti data penduduk, kepadatan penduduk dan kondisi eksisting air minum dikecamatan bulagi selatan dan bulagi menjadi telah di lakukan . Data ini sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan prumusan kebijakan keputusan. Sementara itu, kondisi eksisting memberikan gambaran nyata mengenai keterbatasan atau tantangan yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.

3. Pengumpulan data primer

- a. Survei hidroge air permukaan untuk mengetahui besarnya sedimentasi, ilfiltrasi, evaporation dan limpasan.

Maka berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam survei hidroge itu merupakan kewenangan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) untuk. Sementara Dinas PUPR itu fokus pada ketersediaan dan keberlanjutan aliran air baku dari sumber menuju instalasi pengelolaan air (IPA)

- b. Survei Topograf untuk mengetahui jalur pipa transmisi dan distribusi serta rencana tapak bangunan.

Maka berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa dalam penyediaan air bersih di lakukan survey topografi. Survei topografi dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui titik-titik strategis yang dapat digunakan dalam pembangunan sistem air bersih akan program penyedian air bersih untuk kecamatan bulagi selatan dan bulagi, akan tatapi masih menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pembebasan lahan jalur pipa yang akan melewati perkebunan masyarakat. Namun permasalahan tersebut tidak diabaikan begitu saja, melainkan di respons melalui koordinasi intensif antara dinas PUPR, pemerintah kecamatan serta pemerintah desa. Langkah koordinatif di perkuat dengan kebijakan bupati yang 68 memberikan mandat kepada para kepala desa untuk melakukan pendataan terhadap masyarakat pemilik lahan.

b. Pelaksanaan perencanaan teknis

1. Perencanaan teknis air baku adalah perencanaan untuk mengidentifikasi sumber air baku, menganalisis kualitas air baku, dan menentukan sumber air baku yang digunakan. Maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa perencanaan air baku untuk program penyedian air bersih di kecamatan bulagi selatan dan bulagi menggunakan air sungai paisulalomo yang berada di desa lemelu. Selanjutnya, keterlibatan dinas lingkungan hidup dalam melakukan uji kualitas air di laboratorium menegaskan bahwa aspek kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam program penyedian air bersih dan hasil pengujian menyatakan air sungai paisulalomo layak digunakan dan dikonsumsi.dan untuk izin air baku sudah ada dari pemerintah daerah.
2. Perencanaan teknis unit transmisi air baku Perencanaan unit tranmisi air baku adalah proses perencanaan yang dilakukan untuk menentukan rute tranmisi air baku dan perancangan fasilitas pendukung. Maka Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan rute tranmisi air baku di kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi telah disusun dengan mempertimbangkan jalur dari intake sungai paisulalomo hingga ke IPA. Namun perencanaan ini masih menghadapi tantangan utama selain keterbatasan anggaran pembebasan lahan menjadinya salah satu kendala. Sementara itu untuk lahan yang masuk kawasan hutan terbatas, izin sudah diperoleh melalui koordinasi dengan dinas Kehutanan Provinsi. Kondisi ini menegaskan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada efektivitas koordinasi antara dinas PUPR, pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat setempat dalam mencari solusi bersama.

3. Perencanaan Unit Produksi Perencanaan unit produksi adalah perencanaan dalam penentuan teknologi pengelolaan, perancangan fasilitas pengolahan, perancangan control. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa perencanaan unit produksi, unit distribusi dan pelayanan dalam program penyediaan air bersih di kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi belum di lakukan. Hal ini karenan prioritas Dinas PUPR masih difokuskan pada transmisi air baku hingga ke instalasi pengelolaan air (IPA).

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Program (PUPR) Penyediaan Air Bersih (Studi Kasus Kecamatan Bulagi Selatan Dan Bulagi) belum terlaksana secara keseluruhan . Hal tersebut di dukung fakta dilapangan terkait program penyediaan air bersih yang baru tahap perencanaan dan belum tahap pelaksanaan pembangunan Pada tahap awal, Dinas PUPR telah melaksanakan beberapa kegiatan, antara lain:

- Identifikasi kebutuhan akan penyediaan air bersih di Kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat, potensi sumber air baku, dan tantangan wilayah.
- Pengumpulan data sekunder, seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan kondisi eksisting pelayanan air minum.
- Pengumpulan data primer, melalui survei lapangan, termasuk survei topografi untuk menentukan jalur pipa transmisi air baku serta titik lokasi Instalasi Pengelolaan Air (IPA).
- Pelaksanaan Perencanaan teknis yang meliputi perencanaan air baku, jalur pipa transmisi.

Walaupun tahap persiapan sudah dilakukan, masih terdapat kekosongan dalam tahapan lanjutan, khususnya, Perencanaan unit produksi, Perencanaan unit distribusi, dan Perencanaan unit pelayanan. Keterlambatan dalam pelaksanaan perencanaan lanjutan ini dikarenakan fokus Dinas PUPR masih terpusat pada air baku dan transmisi air baku hingga ke IPA, sehingga aspek lainnya belum dapat ditindaklanjut. Dan program penyediaan air bersih masih memiliki kendala antara lain.

- Anggaran dari APBN. Hingga saat ini, tahap pembangunan fisik belum bisa dilakukan karena masih menunggu dukungan anggaran dari pemerintah pusat.
- Permasalahan pembebasan lahan. Lahan yang akan dilalui jalur pipa masih bermasalah karena belum adanya kesepakatan dengan masyarakat pemilik lahan. Kondisi ini menyebabkan adanya kebutuhan untuk melakukan komunikasi intensif, musyawarah, dan pendataan ulang terhadap masyarakat yang terkena dampak.

Dengan demikian, Peran Dinas PUPR dalam program penyediaan air bersih di Kecamatan Bulagi Selatan dan Bulagi belum terlaksana secara menyeluruh. Hal ini karena peran yang dijalankan masih sebatas pada tahap persiapan dan perencanaan

teknis awal, sedangkan tahap lanjutan hingga ke pembangunan fisik belum berjalan. Faktor penyebab utama adalah fokus yang masih terbatas pada transmisi air baku, keterbatasan anggaran, serta permasalahan lahan yang belum terselesaikan.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

Soerjono Soekanto. 2009. Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta
Raho. Bernard, 2007. Teori Sosiologi Modern. Prestasi Pustakaraya. Jakarta

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Dewi, R., Shara, Y., Emty, D., & Herlinda, H. (2021). Pelaksanaan Fungsi Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pengembangan Jaringan Distribusi
Sistem Penyedia Air Minum. *Jurnal EL-RIYASAH*, 12(2), 188-210.

Modika Yosua Ba. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Penyediaan Air Bersih Di
Desa Datah Kotou Kecamatan Tanah Siang Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*

Praventy, I. (2022). Peran Humas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr)
Dalam Mensosialisasikan Program Pengelolaan Drainase Di Kota Pekanbaru. 1–
77.

Shara, Y. (2021). *Analisis Pelaksanaan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
Ruang Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Jaringan Distribusi Sistem
Penyediaan Air Minum (Spam) Di Kecamatan Rumbai* (Doctoral dissertation,
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Siregar, N. (2022). *Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) dalam perawatan dan perbaikan prasarana penyediaan air
minum Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara* (Doctoral
dissertation, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan).